

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TANGERANG SELATAN

EVALUATION OF WASTE MANAGEMENT POLICY IN SOUTH TANGERANG CITY

Oleh

Norisa Salsabila, Herbasuki Nurcahyanto, Tri Yuniningsih
Norisalsabila27012002@gmail.com, herbasukinurcahyanto@lecturer.undip.ac.id,
triyuningsih26@gmail.com

Departement Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269
Telepon (024)7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research discusses the Evaluation of Waste Management Policies in South Tangerang City. This research was motivated by the Cipeucang TPA which was experiencing limited capacity problems and was already overloaded due to an increase in the volume of unaccommodated waste and soil and air pollution due to uncontrolled waste dumping. This negative impact can damage ground air quality and cause air pollution, threatening public health and the surrounding environment. The aim of this research is to evaluate waste management policies in South Tangerang City and analyze supporting factors for waste management in South Tangerang City. The research method uses a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews and observation. The informants interviewed were the Head of DLH for South Tangerang City, the Head of Cipeucang TPA, waste managers at Cipeucang TPA and the community. The results of this research indicate that the evaluation of waste management policies in South Tangerang City can be said to be good. This happens with the success of 4 of the 6 existing dimensions based on the theory presented by (Dunn, 2003) regarding Policy Evaluation with 6 phenomena, namely those that have worked well, namely adequacy, alignment, responsiveness and accuracy, those that have not yet run with sufficient effectiveness and efficiency.

Keywords: Evaluation, Policy, Waste management, Cipeucang TPA

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Indonesia telah menyebabkan peningkatan drastis dalam produksi sampah, terutama di wilayah perkotaan. Sampah menjadi salah satu masalah utama lingkungan, dengan sebagian besar belum diproses dengan baik. Pembakaran dan pembuangan sampah sembarangan menjadi penyumbang utama gas rumah kaca dan pencemaran lingkungan. Indonesia telah mencatatkan diri sebagai salah satu dari lima negara terbesar penyumbang sampah di dunia pada tahun 2020. Masalah sampah di Indonesia tidak hanya mengancam Kesehatan masyarakat, tetapi juga keberlanjutan lingkungan, terutama dalam mencapai target Pembangunan Berkelanjutan 2030, khususnya Target 11.6 yang menekankan manajemen limbah perkotaan yang efisien. Diperlukan upaya serius untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan penerapan teknologi pengolahan sampah yang lebih baik. (Primantoro, 2023; Annur, 2022; Cao et al., 2017)

Permasalahan sampah di Indonesia terkait dengan beberapa target pembangunan berkelanjutan, khususnya Target 12.5 yang menekankan pengurangan

limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan yang berkelanjutan. Dengan peningkatan jumlah sampah, terutama plastik yang sulit terurai, Indonesia harus meningkatkan upaya dalam daur ulang dan pengelolaan limbah secara menyeluruh. Masalah sampah juga terkait dengan tantangan dalam mencapai target perubahan iklim dan pelestarian ekosistem laut. Pembakaran sampah tidak terkendali berkontribusi pada emisi gas rumah kaca, sementara sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat merusak ekosistem laut. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengatasi masalah ini. Pertumbuhan penduduk di Indonesia telah meningkatkan volume dan keragaman sampah, mengakibatkan akumulasi sampah di tempat pembuangan akhir dengan berbagai dampak negatif, termasuk kesehatan masyarakat. (Hasibuan, 2016).

Pengelolaan sampah di Indonesia, sebagaimana diatur oleh UU No 18 Tahun 2008 dan PP No 81 Tahun 2012, menekankan pada pengurangan dan penanganan sampah melalui partisipasi masyarakat dan pihak pengelola sampah. Namun, perkembangan wilayah perkotaan di Indonesia, diikuti dengan migrasi

penduduk ke pedesaan, menyebabkan pertumbuhan penduduk seiring dengan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Pelayanan pengelolaan sampah terhambat oleh kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, terutama dalam pengangkutan sampah.

Kota Tangerang Selatan mengalami tantangan serupa, di mana TPA Cipeucang, sebagai tempat pembuangan akhir, tidak mampu menampung seluruh sampah yang dihasilkan. Produksi sampah yang tinggi, mencapai 1000 ton per hari, tidak sebanding dengan kapasitas TPA yang hanya mampu menampung 300-400 ton per hari. Pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, namun sistem pengelolaan yang digunakan, yakni open dumping, kurang optimal dan menimbulkan dampak negatif bagi pemukiman penduduk di sekitarnya.

TPA Cipeucang di Kota Tangerang Selatan mendekati batas maksimum kapasitasnya dalam menampung sampah, mencapai ketinggian 16 meter. Overloadnya tumpukan sampah mengakibatkan longsornya dan menutupi sebagian aliran sungai Cisadane, yang merupakan sumber air untuk PDAM dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dampaknya mencakup pencemaran sungai

dan bau menyengat yang dirasakan hingga radius 3 Km. Membuang sampah sembarangan umumnya terjadi tanpa memandang usia atau status sosial, sering kali ditiru dari orang dewasa. Pengelolaan sampah diatur dalam PERDA No. 13 Tahun 2019, yang mewajibkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk mengelola sampah secara baik dan bertanggung jawab.

Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang mendekati batas maksimum kapasitasnya, mendorong pengiriman sampah ke Cilowong Serang untuk mengurangi beban. TPST 3 (R) di tiap kelurahan membantu dalam pemilahan dan daur ulang sampah sebelum sampai ke TPA. Tetapi, kesulitan dalam memperbanyak jumlah TPST3R terjadi karena penolakan masyarakat terkait bau dan kebersihan lingkungan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, melalui Dinas Lingkungan Hidup, berupaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah di TPA Cipeucang dengan menghadirkan teknologi yang tepat guna. Produksi sampah yang terus meningkat menambah urgensi penanganan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Masalah pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan mencakup keterbatasan infrastruktur, terutama dalam

hal pemilahan dan pengolahan sampah, serta keterbatasan lahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang. Pengelolaan sampah di TPA Cipeucang mengalami kendala signifikan karena penumpukan sampah yang terus bertambah, menyebabkan antrian truk sampah dan bahkan kebocoran sampah ke Sungai Cisadane. Pencemaran lingkungan, terutama akibat gas metana dan hidrogen sulfida dari TPA, mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya menanggulangi masalah tersebut, tetapi tantangan infrastruktur dan partisipasi masyarakat menjadi penghambat utama. Evaluasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di TPA Cipeucang menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah serta menanggulangi dampak negatifnya. (Tangerang Daily, 2021).

TPA Cipeucang di Kota Tangerang Selatan mengalami kelebihan beban akibat penumpukan sampah yang sudah mencapai ketinggian maksimum. Setiap hari, sekitar 300 ton sampah masuk ke TPA, dan longsor sampah telah mencemari Sungai Cisadane dengan jumlah mencapai 100 ton. Masalah ini memperlihatkan perlunya penanganan sampah yang efisien dan

kompleks, melibatkan berbagai pihak terkait termasuk pemerintah dan masyarakat. Prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) penting diterapkan untuk mengurangi volume sampah. Pemerintah berusaha mencari solusi dengan mencari investor untuk membangun PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) atau bekerja sama dengan daerah lain seperti TPA Pandeglang untuk mengurangi beban TPA Cipeucang.

A. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

1. Kapasitas TPA yang terbatas: TPA Cipeucang mengalami masalah kapasitas yang terbatas dan sudah overload akibat peningkatan volume sampah yang tidak tertampung.
2. Pencemaran air tanah dan udara: TPA Cipeucang menghadapi masalah pencemaran air tanah dan udara akibat penimbunan sampah yang tidak terkendali.
3. Potensi bencana banjir: Penimbunan sampah yang tidak terkendali di TPA Cipeucang dapat menjadi penyebab bencana banjir.
4. Penolakan masyarakat terhadap

TPA: Sebelumnya, TPA Cipeucang menghadapi penolakan masyarakat setempat karena dampak negatif yang ditimbulkan, seperti bau tidak sedap dan pencemaran lingkungan.

5. Kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai: TPA Cipeucang menghadapi tantangan dalam infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, terutama terkait dengan sistem pengolahan sampah yang efektif.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Tangerang Selatan?
2. Apa saja faktor pendukung evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Tangerang Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan yang telah disebutkan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di kota

Tangerang Selatan.

2. Menganalisis faktor pendukung evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Tangerang Selatan.

D. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Administrasi publik adalah ilmu perencanaan pemerintahan yang baik (Thoha, 2008:94). Administrasi publik adalah langkah koordinasi merancang, menerapkan kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat dan mencapai tujuan negara (Wirman, 2012:25).

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas R Dye (Public policy) yang dikutip oleh Subarsono (2009:2) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah segala sesuatu yang pemerintah putuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is what the goverde Decisions to do or not do*)”

3. Tahapan Kebijakan Publik

Berdasarkan pembahasan diatas kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang melalui beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut menurut Willam N Dunn (Hidayanti,

2018) terbagi menjadi 5 (lima) tahap sebagai berikut : Perumusan masalah, Peramalan, rekomendasi, pemantauan, penilaian.

4. Evaluasi Kebijakan

Pengertian evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya evaluasi; hasil Menurut Bryan dan White (1987), evaluasi adalah upaya mendokumentasikan dan mengevaluasi apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi. Evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang prasyarat pelaksanaan program/rencana dan kemudian.

5. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Evaluasi suatu program atau kebijakan umum memerlukan adanya kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan umum. Kriteria yang dirumuskan dapat dijadikan indikator untuk menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui gambaran secara khusus mengenai program pengolahan sampah masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan a)

dimana hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk deskripsi atau menggambarkan bagaimana pengolahan sampah masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran lingkungan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti menemukan permasalahan yang mendalam terkait dengan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Tangerang Selatan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. 1. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan

a. Pengurangan Volume Sampah di Kota Tangerang Selatan

Pengurangan volume sampah di Kota Tangerang Selatan belum baik karena masih terdapat kekurangan yaitu, masih banyak masyarakat yang belum terlibat program bank sampah yang dibuat oleh TPA

b. Kualitas Lingkungan

Kualitas Lingkungan sudah baik karena sudah berdampak positif untuk peningkatan kualitas lingkungan, beberapa kualitas lingkungan yang berdampak positif yaitu dengan mengurangi pembakaran sampah terbuka.

c. Kapasitas Fasilitas

Kapasitas Fasilitas belum baik karena masih terdapat kekurangan yaitu, masih banyak masyarakat yang belum terlibat program bank sampah yang dibuat oleh TPA Cipeucang.

d. Penggunaan SDM

Penggunaan SDM belum baik, dikarenakan masih kekurangannya tenaga SDM.

e. Keterpaduan Kebijakan

Keterpaduan kebijakan sudah baik, melihat dari pemaparan informan yang menyatakan selalu dilakukannya koordinasi antar semua pihak.

f. Ketersediaan Layanan

Ketersediaan layanan sudah baik. Karena program yang ada juga sudah tersampaikan kepada masyarakat.

g. Biaya Operasional

Biaya operasional pengelolaan sampah sudah baik, dikarenakan banyaknya hal yang mempengaruhi efisiensi biaya, penggunaan modern dan infrastruktur dapat mengurangi biaya operasional salah satu contoh, fasilitas daur ulang yang efisien dan kendaraan pengangkut sampah yang ramah lingkungan.

h. Kesetaraan Akses

Kesetaraan akses sudah baik. Dalam hal ini, pemerintah sudah melakukan upaya

untuk memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang setara terhadap layanan pengelolaan sampah.

i. Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat sudah baik, telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa semua warga, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau ekonomi yang lemah, memiliki akses yang setara terhadap layanan pengelolaan sampah.

j. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sudah baik dengan adanya upaya yang dilakukan sudah menerapkan edukasi masyarakat tentang dampak positif dari partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, pendapat dan masukan warga dapat membentuk kebijakan yang lebih baik.

k. Keterlibatan Stakeholder

Keterlibatan stakeholders sudah baik dengan adanya keterlibatan partisipasi dari berbagai lapisan pihak yaitu Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat dan komunitas local, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

L. Ketepatan Instrumen Kebijakan

Ketepatan instrumen kebijakan pengelolaan sampah di kota Tangerang Selatan sudah baik, sudah adanya

regulasi yang diterapkan. Meskipun memiliki kekurangan seperti implementasinya masih menghadapi kendala baik dari segi kinerja maupun fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat dengan melakukan pemisahan sampah dari sumber, partisipasi dalam program bank sampah.

2. Faktor Pendukung Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan

a. Keterbukaan

Keterbukaan kebijakan sudah baik, masyarakat dapat mengakses data tentang timbulan sampah, komposisi sampah, fasilitas pengelolaan sampah, dan pencapaian kinerja pengelolaan sampah, informasi tentang pengelolaan sampah biasanya disampaikan melalui seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya sudah baik. Masyarakat dapat mengakses data informasi terkait sampah melalui situs website SIPSN.

b. Anggaran

Anggaran sudah baik, hal ini ditegaskan dengan pernyataan bahwa alokasi anggaran paling besar

DLH Tangerang selatan digunakan untuk melaksanakan program kegiatan pengelolaan sampah.

b. Teknologi

Teknologi sudah baik, dalam penggunaan teknologi dalam pengelolaan sampah sudah memiliki perkembangan seperti penggunaan sensor pengisian tempat sampah, sistem pengumpulan otomatis, teknologi pengolahan terbaru, aplikasi pengelolaan sampah dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah.

c. Komitmen Pemerintahan

Komitmen pemerintahan sudah baik mendukung kebijakan pengelolaan sampah dengan cara pemerintah mendorong pengumpulan sampah terpisah berdasarkan jenisnya, seperti organik, plastik, kertas, dan logam. Agar memudahkan proses daur ulang dan pengolahan lebih lanjut, dan juga pemerintah mengenalkan teknologi modern dalam pengelolaan sampah, seperti sensor pengisian tempat sampah, aplikasi pemantauan, dan sistem pengumpulan otomatis.

d. Kerjasama Antar Pihak

Kerjasama antar pihak sudah baik karena sudah banyak inisiatif yang sudah dilakukan yaitu terus menjajaki kerja sama pengiriman sampah dengan sejumlah wilayah, termasuk Pemrov Jawa Barat, dan Kabupaten Lebak, penjajakan ini juga berhubungan dengan tempat pembuangan akhir sampah di Cilowong, Serang.

e. Pihak Pengelola Sampah

Pihak pengelola sampah sudah baik yaitu dengan sudah adanya pihak yang bertanggung jawab langsung untuk mengelola sampah yaitu UPTD Pengelolaan sampah yang mempunyai tanggung jawab terhadap kegiatan teknis operasional terkait pengelolaan sampah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan menunjukkan kemajuan yang baik, terutama dalam aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, masih terdapat hambatan dalam efektivitas dan efisiensi. Faktor pendukungnya meliputi komunikasi

yang baik, alokasi anggaran memadai, komitmen pemerintah, kerjasama antar pihak, dan struktur birokrasi yang jelas. Hambatannya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam program bank sampah dan kekurangan sumber daya manusia. Overall, ada potensi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan lebih melibatkan masyarakat dan meningkatkan kapasitas SDM.

SARAN

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Efektivitas dalam evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Tangerang Selatan masih belum baik. Untuk mengatasi hal ini dengan meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah, melalui peningkatan jumlah tempat pembuangan sampah yang terpisah antara sampah organik dan non-organik, serta peningkatan fasilitas daur ulang. Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan kolaborasi dengan komunitas lokal, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat untuk ikut mendukung dan mempromosikan program bank sampah. Mereka dapat menjadi agen

perubahan yang efektif dalam memotivasi partisipasi masyarakat.

2. Efisiensi dalam evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Tangerang Selatan masih belum baik. TPA Cipeucang maupun Dinas Lingkungan Hidup bisa mengembangkan jaringan kerja dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil yang memiliki keahlian teknis dalam bidang pengelolaan sampah. Dengan adanya kolaborasi ini dapat memberikan dukungan tambahan dalam peningkatan kapasitas tenaga SDM di TPA Cipeucang

DAFTAR PUSTAKA

Revki Iboyma, M., Sjafari, A., & Cadith, J. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Bidang Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 9–23. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6302>

Kesiapan, S., Menerima, D., Desa, D., & Kabupaten Gowa, D. (n.d.). *Evaluasi Kebijakan Publik*.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. (2018). Rencana Pengelolaan Sampah Kota Tangerang Selatan 2018-2023.

Ramadhan, B. (2020, May 27). *TPA CIPEUCANG Longsor, Warga Serpong khawatir banjir*. Republika Online. <https://news.republika.co.id/b erita/qaz7uy330/tpa-cipeucang-longsor-warga-serpong-khawatir-banjir>

Perda Kota Tangerang Selatan no. 13 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. [JDIH bpk ri]. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/124213/perda-kota-tangerang-selatan-no-13-tahun-2019>

Patton, C. v., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (n.d.). *Basic methods of policy analysis and planning*.

Bogdan, Robert., & Biklen, S. Knopp. (1998). *Qualitative research for education : an introduction to theory and methods*. Allyn and Bacon.

- Miles, M. B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, J. (n.d.). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition*.
- Teoretis, K., & Aplikatif, D. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. www.cendekiapress.com
- Julinda, D., Wahyuni, T., & Pudjadi Susilo, T. (n.d.). Nomor 1, Februari, 2022 hal. *Media Riset Akuntansi*, 12, 45–70. <https://www.idntim>
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An introduction*. Routledge.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. SAGE Publications.
- Yin, R. K. (2017). *Case study research and applications: Design and methods*. SAGE Publications.
- Bungin, B. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Riset Substansial*. Prenada Media.
- Rochman, N. (2019). *Analisis kebijakan publik: Teori dan aplikasi*. Rajawali Pers.
- Patton, C. V., & Sawicki, D. S. (2020). *Basic methods of policy analysis and planning*. Routledge.
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *Focus groups: A practical guide for applied research*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.
- Prasetyo, B. E. (2016). *Evaluasi Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. UMM Press.
- Sinaga, A. H. (2015). *Kebijakan Publik dan Penganggaran*. Prenada Media.
- Subarsono, A. (2018). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Tilaar, H. A. R. (2017). *Teori dan Praksis Kebijakan Publik*. RajaGrafindo Persada.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research*. SAGE Publications.

- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2019).
Qualitative research for
education: An introduction to
theories and methods. Allyn &
Bacon.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (Eds.).
(2014). Theories of the policy
process. Westview Press. Weiss,
C. H. (2018). Evaluation:
Methods for studying programs
and policies. Pearson.
- Alamsyah, A., & Aribowo, Y.
(2017). Kebijakan publik: Teori,
proses, dan studi kasus.

